

# PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

- Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut:
- Decentralization is the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and *parastatal* (italics in original) organization, local government or non-governmental organization.

# MENURUT DENNIS RONDINELLI

- Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang dan kekuasaan : perencanaan, pengambilan keputusan
- dari pemerintah pusat
- kepada
- pemerintah daerah (organisasi-organisasi pelaksana daerah, unit-unit pelaksana daerah) kepada organisasi semi-otonom dan semi otonom (*parastatal* ) atau kepada organisasi non-pemerintah.

## MENURUT WORLD BANK

- Desentralisasi atau Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi pemerintah yang menjadi bawahannya atau yang bersifat semi-independen dan atau kepada sektor swasta

# M.Mas'ud Said

- Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah adalah proses pelimpahan, wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota (dalam koridor UU 32/2004 dan UU 33/2004, UU No. 18/2001 untuk DI Aceh, UU No. 21/2001, untuk Papua)

# Serba serbi Otonomi Daerah

- Keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya:
- Kasus: Kota Padang: Perda Syariat Islam
- ditolak oleh Depdagri (karena kebijakan itu melebihi kewenangan daerah otonom, Padang bukan Otsus seperti Aceh dan Papua )

# Otonomi Khusus Papua dan Aceh

- Papua ada Majelis Rakyat Papua (MRP)
- Aceh ada Qonun (Undang undang mengenai pemerintahan Aceh) -----Perda
- Mengapa ada Otsus:
- Pertimbangan Politis
- Kesejarahan (historis)
- Alasan lain....

# Sejarah Desentralisasi

- Sejak 1945, ketika Founding Fathers memilih negara kesatuan RI. Tercermin dalam isi rapat BPUPKI, yang menandaskan pasal 18 UUD 1945. ---bukan negara federasi atau bentuk negara yang monarchi, bukan negara sentralistis.
- Berlanjut UU no. 5 /1974 tentang pemerintahan daerah. Yang diikuti dengan pencanangan Otonomi Percontohan thn 1992 dengan memilih masing masing satu kota/kab di setiap propinsi. -----tekad untuk desentralisasi
- Selanjutnya, momentum reformasi : TAP MPR IV/2000, tentang pelaksanaan good governance dan Otonomi Daerah.
- Lalu diikuti oleh undang undang yang sangat radikal yaitu UU 21/ 1999 tentang otonomi daerah. Disinilah dimulai otonomi daerah yang sesungguhnya. Sangat radikal dan merubah arah otronomi dari sentralistis,

# Teori Alasan Mengapa Harus DESENTRALISASI (OTONOMI DAERAH)

## SEBAGAI SARANA DEMOKRATISASI

(Mark Turner dan David Hulme,  
Weale, World Bank)

## KUALITAS DAN EFISIENSI PEMERINTAHAN

(Smith, Burki and Perry, World  
Bank, Cohen and Paterson)



GOOD  
GOVERNANCE

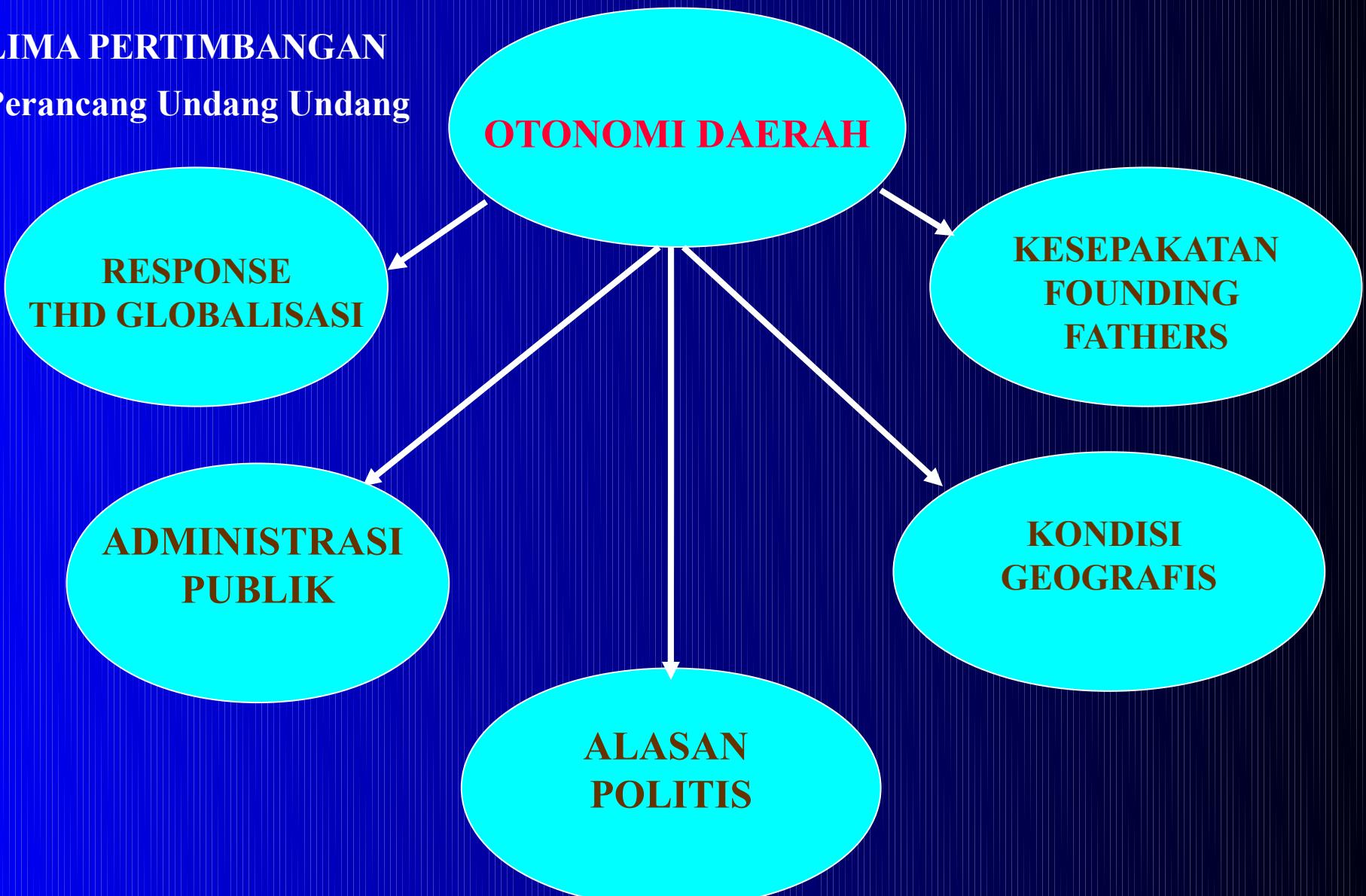
## STABILITAS PEMERINTAHAN DAN PERSATUAN

(Treisman and World Bank)

## PEMBANGUNAN DAERAH DAN PARTISIPASI

(Rondinelli and Cheema, Litvack,  
Achmad and Bird)

LIMA PERTIMBANGAN  
Perancang Undang Undang



Yarat keberhasilan

ndang Undang  
aturan Pemerintah

litik Lokal Kondusip

mber Daya Keuangan

mber Daya Manusia

daya Birokrasi

ovasi Pemerintahan

ndardisasi dan  
valuasi

# ASUMSI DENGAN OTONOMI DAERAH



Hasil positif

Good  
governance

· Pemerintahan yang demokratis

· Partisipasi Masyarakat Luas

· Administrasi Pemerintahan yang Efisien

· Pelayanan yang lebih bagus

· Responsible government

# MASALAH OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

PEMERINTAH  
PUSAT:

PEMERINTAHAN  
DAERAH :

PERUNDANGAN  
PERATURAN  
PEMERINTAH

Resistensi  
In-kosistensi  
Ke- tidak- terpaduan  
Sentralisme

Keuangan, SDM  
Pemerintahan  
Birokrasi – Aparat  
Self- serving

In-kosistensi  
In- Clarity  
Kelambanan  
Jual - beli pasal  
Formalisme

# Masalah Bidang Regulasi

- Tahun, 2006, 2007 pemerintah mengeluarkan lebih dari SERATUS TIGA PULUH Peraturan Pemerintah, 120 keputusan menteri (lihat sebagian daftarnya..)
- Salah satunya ialah PP 41/2007 mengenai besaran dan struktur birokrasi di daerah yang masih bermasalah
- PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah Kota/Kabupaten dengan Propinsi
- Kasus Kabupaten Lembata: DPRD Kabupaten itu menayakan kepada pemerintah Kota tentang bukti slip pengeluaran dana 12,3 milyar. Pemerintah kabupaten tidak punya bukti pengeluaran. BPK perwakilan Kupang juga mempertanyakan.

# Dalam Kenyataan di Indonesia

(Investigasi M.Mas'ud Said 2001-2004)

- Otonomi dibarengi korupsi di daerah
- Otonomi dibarengi keruwetan administrasi
- Di tahun awal diikuti menurunnya kualitas pelayanan
- Pertengkaran Pusat – daerah,
- Pertengkaran daerah dengan daerah,
- Pertengkaran masyarakat dengan pejabat

# Tetapi Ternyata Juga

- **WELL PLANNED BUT BAD IN IMPLEMENTATION**  
( Cheema and Rondinelli, World Bank Report 1999, 2001, 2003)
- **DECENTRALIZATION** With In-adequate preparation  
(Rondinelli 2000, Turner, Said 2004)
- Decentralization with no standard of evaluation and monitoring (The World Bank Report, 2001)

# Ternyata Otonomi Daerah

- DIPAKAI DAN DIAPLIKASIKAN DI 95% NEGARA ANGGOTA PBB (Laporan Bank Dunia, 1999, 2001, 2003)
- DIPERCAYA SEBAGAI OBAT MUJARAB mengatasi PENYAKIT PEMERINTAHAN (Rondinelli 2003, Turner 2003, Cheema 2003)
- DIANGGAP SEBAGAI BAGIAN DAN SYARAT DEMOKRATISASI ( Cohen and Paterson, Rondinelli and Cheema 2003)

# **CONTOH DAFTAR 33 PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

1. PP TENTNG PILKADA (PP 6/2005)
2. PP TENTANG POL PP (PP 32/2004)
3. PP TENTANG STANDARD AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP 24/2005)
4. PP TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DPRD (PP 37/2005)
5. PP TENTANG PEDOMAN TATIB DPRD (PP 53/2005)
6. PP TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
7. PP TENTANG DESA (PP 72/2005)
8. PP TENTANG KELURAHAN (PP 73/2005)
9. PP TENTANG BINWAS (PP 67/2005)
10. PP TENTANG SPM (PP 65/2005)
11. PP TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PP 58/2005)
12. PP TENTANG EVALUASI PEMDA (DALAM PROSES)
13. PP TENTANG PEMBENTUKAN PEMDA (DALAM PROSES)

# **33 PERATURAN PEMERINTAH (PP)**

14. **PP TENTANG KEWENANGAN**
15. **PP TENTANG BELANJA KEPALA DAERAH**
16. **PP TENTANG LAPORAN PEMDA**
17. **PP TENTANG LKPJ DAN IPPD**
18. **PP HUBUNGAN PELAYANAN UMUM**
19. **PP TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH, PERUBAHAN NAMA, DAN PEMINDAHAN IBUKOTA**
20. **PP TENTANG FUNGSI PEMERINTAHAN TERTENTU**
21. **PP TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS**
22. **PP TENTANG KERJASAMA ANTAR DAERAH**
23. **PP TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH**
24. **PP TENTANG PERANGKAT DAERAH**
25. **PP TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
26. **PP TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

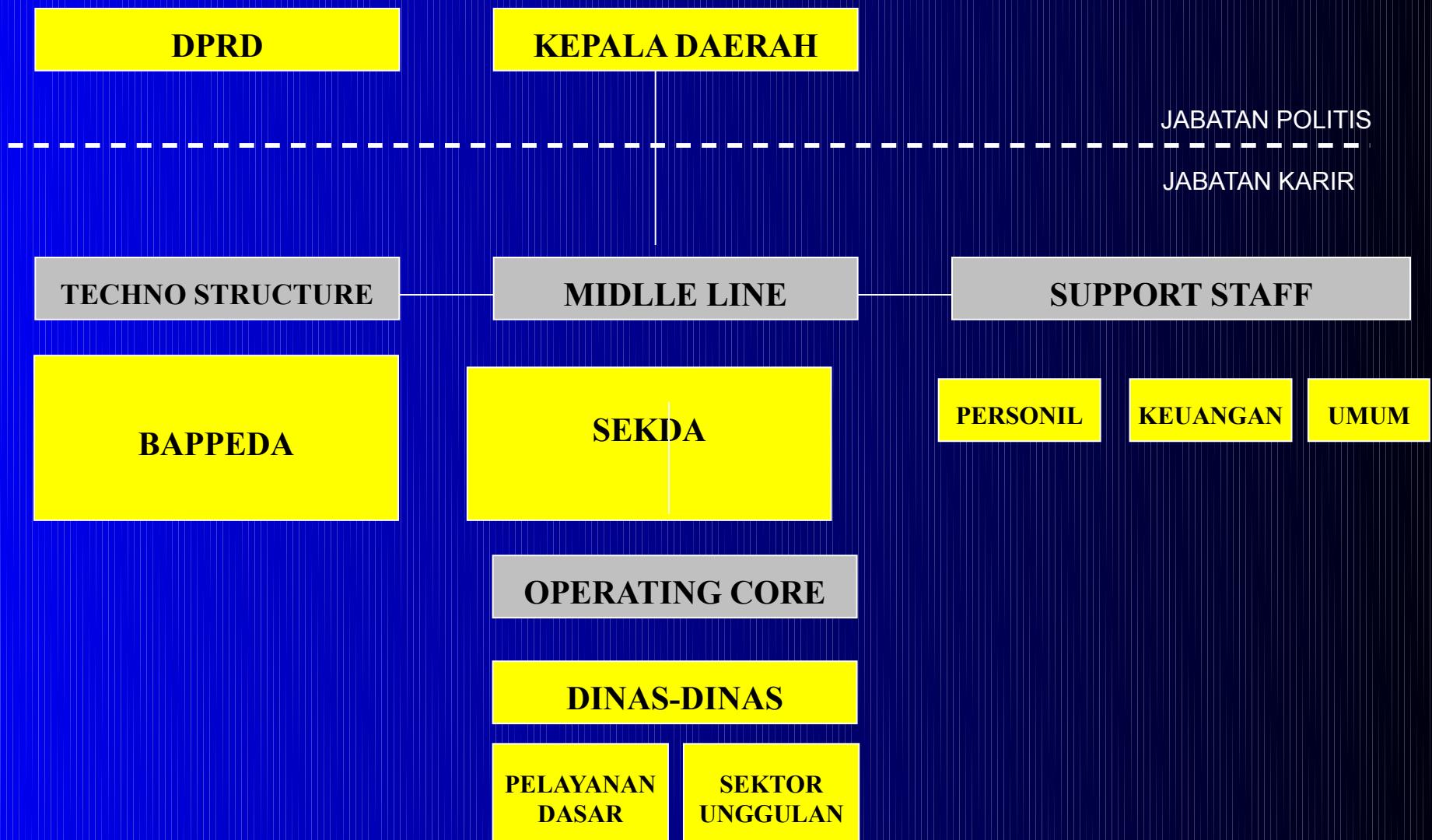
## 33 PERATURAN PEMERINTAH (PP)

27. PP TENTANG KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
28. PP TENTANG PINJAMAN DAN OBLIGASI DAERAH (SELESAI)
29. PP TENTANG PENGELOLAAN DANA DARURAT
30. PP TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT
31. PP INSENTIF KEPADA MASY/INVESTOR
32. PP TENTANG PENGELOLAAN PNS
33. PP TENTANG PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS

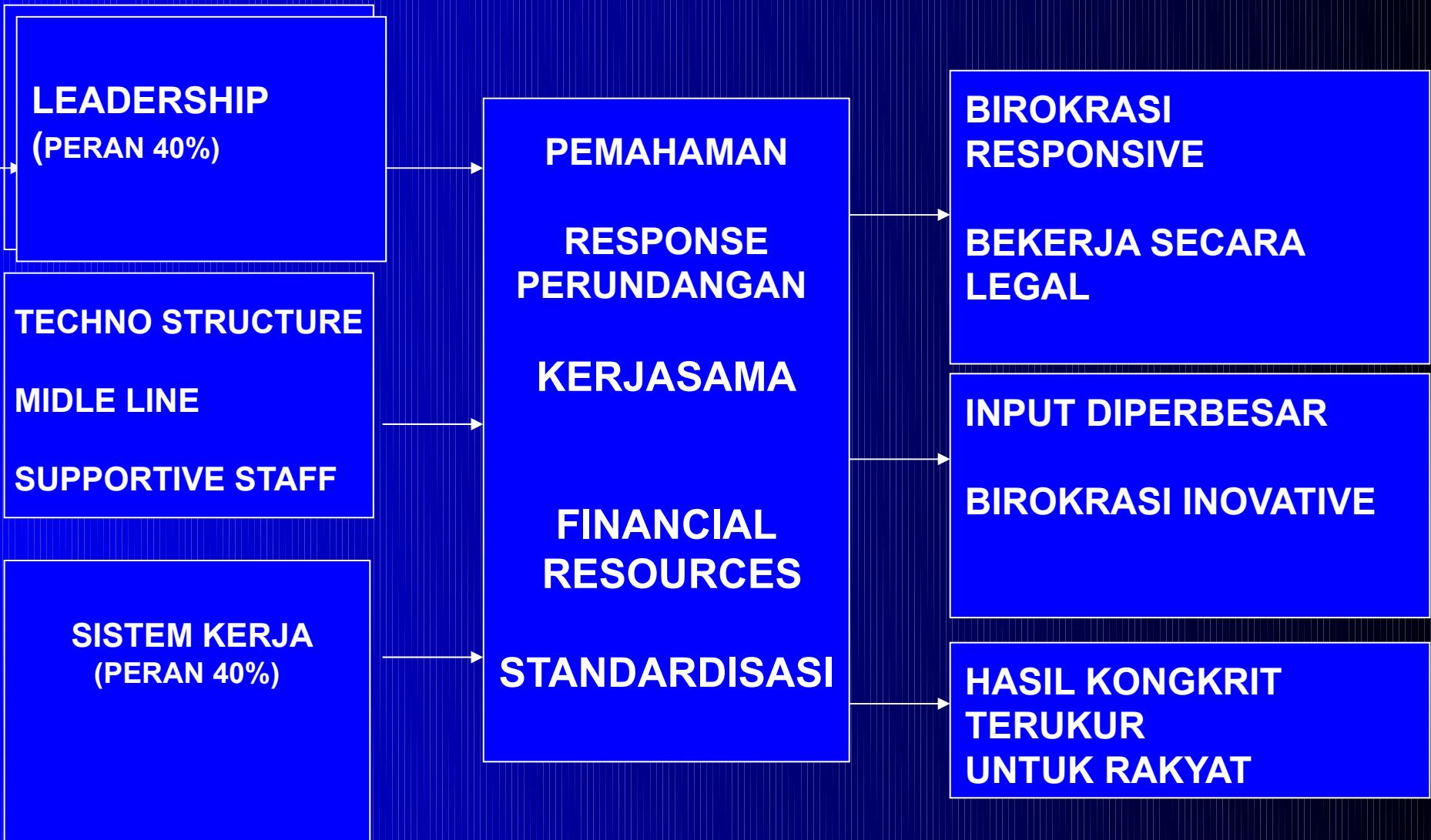
# USULAN PERTAMA UNTUK SUKSES OTODA

- FOKUS REFORMASI PADA **UNIT TECHNO STRUCTURE**
- DIKUATKAN DENGAN INOVASI ADMINISTRASI DI LEVEL **SUPPORTIVE STAFF**
- PENGUATAN STAFF DAN PEMBIAYAAN YANG LEBIH BESAR PADA **OPERATING CORE**
- PERUBAHAN VOLUME, MEREKA YANG BERPENGALAMAN DAG MEREKA YANG BERKEMAMPUAN DENGAN INTRODUKSI **INFORMATION TECHNOLOGY DLM BIROKRASI**

## Techno Structure, Middle Line dan Supporting Staff



# BAYANGAN SUKSES OTONOMI DAERAH



# Usulan awal

- PRIORITAS ke **SISTEM KERJA DAN INOVASI** daripada **MENGANDALKAN “PENGALAMAN”**
- PRIORITAS ke **MANAGERIAL SKILL** dan **SUMBER DARI LUAR DARIPADA “RUTINITAS”**
- PRIORITAS ke **PENGEMBANGAN HASIL** daripada ke **CARA KONVENSIONAL YG LAMBAN**